



REPUBLIK INDONESIA



# KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI LINGKUP DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

Oleh:

Eko Subowo

DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN





# OUTline



## **PEMBAHASAN**

**1**

**KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN  
DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN  
2018**

**2**

**EVALUASI DEKONSENTRASI DITJEN  
BINA ADWIL TAHUN 2014 s/d 2017**

**3**

**KENDALA DAN TINDAK LANJUT**

**4**

**PAGU ANGGARAN PER-KEGIATAN DANA  
DEKONSENTRASI TAHUN 2018**

**1**

**KEBIJAKAN  
PROGRAM/KEGIATAN  
DEKONSENTRASI TAHUN  
ANGGARAN 2018**

# DASAR PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

---

Pelaksanaan Urusan lebih Efisien dan efektif dilaksanakan oleh Daerah

Terciptanya Komunikasi dan hubungan kerja yang serasi antar susunan pemerintahan

Mendorong percepatan kebijakan/ program Nasional

**SINERGI PUSAT DAN DAERAH**

**OPTIMALISASI KINERJA KEMENDAGRI**

# KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI

1

- Penyelarasan antara urusan dengan program/kegiatan Dekonsentrasi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku

2

- Memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi

3

- Mempercepat pencapaian sasaran Proritas Nasional

4

- Memberikan daya ungkit dan manfaat yang signifikan

5

- Penajaman kriteria lokasi dan alokasi

6

- Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi (SDM, Regulasi dan Kelembagaan)



## RUANG LINGKUP DEKONSENTRASI TAHUN 2018

1

Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

2

Dekonsentrasi Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah

**2**

**EVALUASI  
DEKONSENTRASI DITJEN  
BINA ADWIL TAHUN 2014  
s/d 2017**

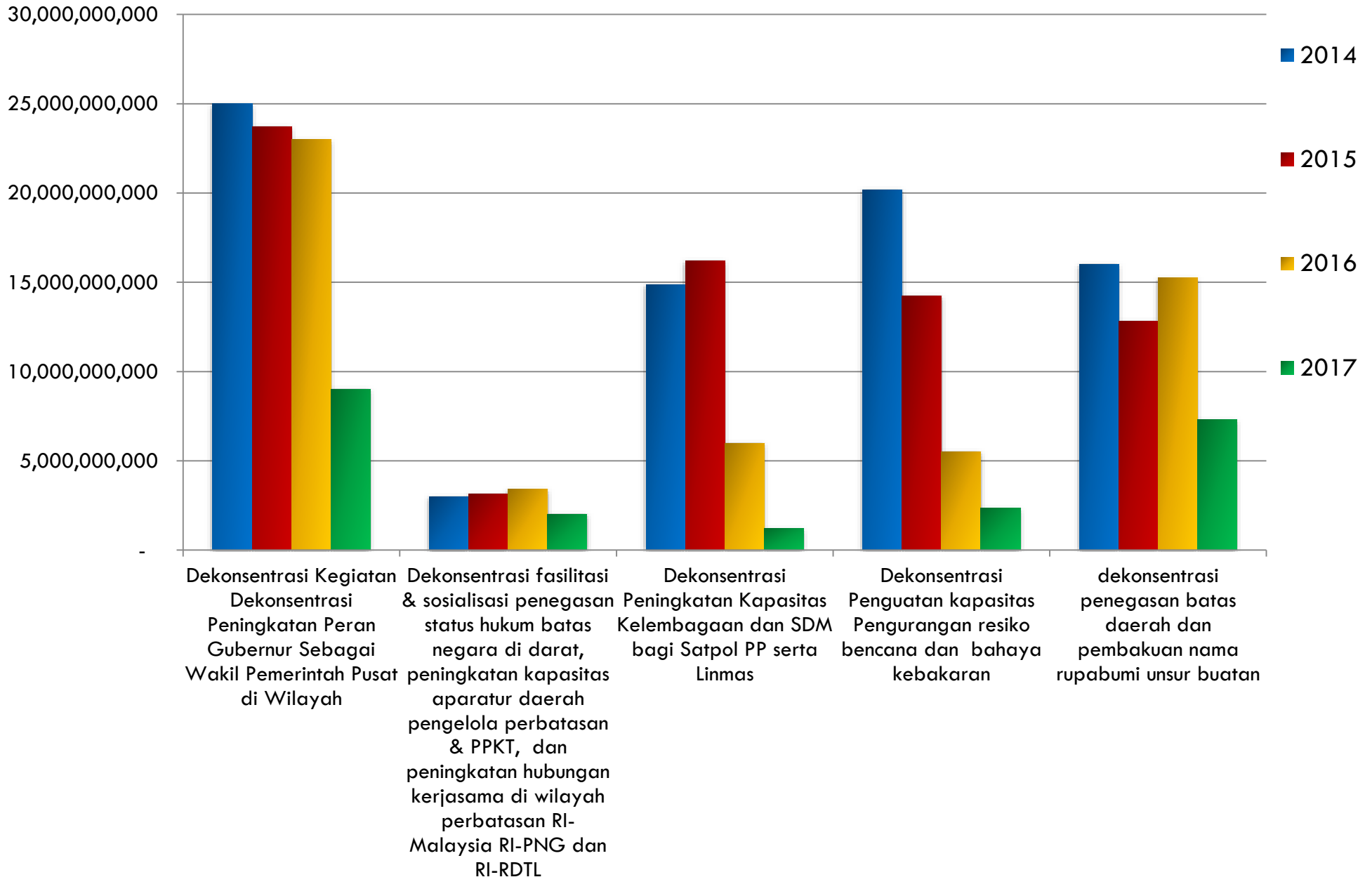
# Evaluasi Pagu Dekonsentrasi Bidang Bina Adwil Tahun 2014-2017

(000)

NO	DEKONSENTRASI	ALOKASI ANGGARAN (RP)				LOKASI SKPD (PROV)			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi	25,000,000	23,712,812	23,000,000	12,188,126	33	33	34	33
2	Penguatan & pengembangan kerjasama daerah	-	2,857,951	-		-	7	-	-
3	Penguatan penyelenggaraan PTSP di daerah	-	-	3,000,000		-	-	10	8
4	Fasilitasi penegasan status hukum batas antar negara peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kegiatan sosekbud dengan negara tetangga	3,000,000	3,158,961	3,400,000	1,700,000	7	7	7	7
5	Penegasan batas daerah dan pembakuan nama rupabumi unsur alami	13,000,000	12,813,575	15,250,000	7,300,000	23	23	24	23
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP serta Linmas	14,885,931	16,207,434	6,000,000	1,200,000	28	29	17	5
7	Pengurangan risiko bencana dan bahaya kebakaran	20,195,732	14,249,267	5,500,000	2,350,000	24	30	14	8
Total		76,081,663	73,000,000	56,150,000	24,738,126				



# Perkembangan Pagu Anggaran Dekon Bidang Bina Adwil Tahun 2014 - 2017



# KRITERIA TEKNIS PENGALOKASIAN DEKONSENTRASI

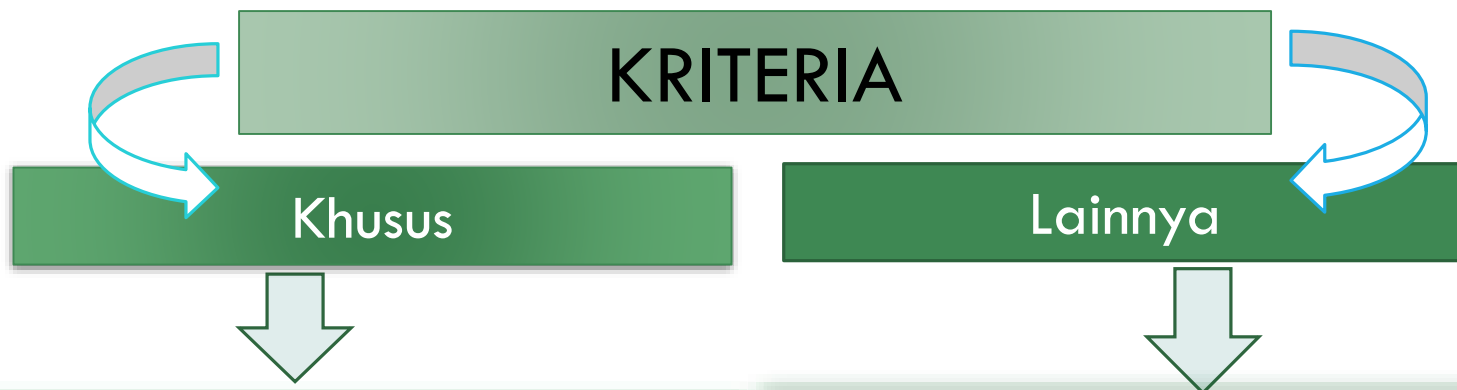
## Kriteria Umum

Lingkup urusan yg menjadi kewenangan Kemendagri

Memperhatikan Rekomendasi Kemenkeu & Bappenas (IFW)

- Memenuhi Kebutuhan minimal unkl pelaksanaan kegiatan dimaksud

Proporsional sebaran daerah (persandingan alokasi & lokasi tahun sebelumnya)



- a. Target Spesifik yang ingin dicapai
- b. Target Prioritas Nasional;
- c. Kebijakan/Mandat peraturan perundang-undangan;

- a. Memiliki institusi yang sudah berbentuk Badan atau setara dengan Dinas, dengan jumlah dan kompetensi SDM secara umum memadai serta diperkirakan akan optimal diberdayakan bila ditingkatkan kapasitasnya;
- b. Rekomendasi hasil monev;
- c. Sebagian daerah pernah mendapat alokasi Dekonsentrasi pada tahun sebelumnya dengan pelaksanaan tertib administrasi, baik aspek pelaksanaan maupun pelaporan

# 3

## **KENDALA DAN TINDAK LANJUT**

### Kendala

1. Belum dilaksanakannya kegiatan yang sudah tercantum dalam RKA-K/L sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
2. Kegiatan telah dilaksanakan namun proses penyelesaian administrasi pencairan kegiatan belum sesuai dengan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
3. Implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi terhadap munculnya kendala kelembagaan dan SDM diantaranya terdapat perubahan struktur pejabat pelaksana/pejabat perbendaharaan, perubahan nomenklatur satker, bahkan perubahan/revisi satker. Di samping itu sebagian terdapat perubahan SDM berkenaan dengan re-organisasi sehingga pada umumnya pengelola kegiatan belum pernah melaksanakan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan bidang administrasi kewilayahan;
4. Adanya kendala koordinasi dan komunikasi pada sebagian satker antara KPA yang berdasarkan Juknis telah ditetapkan pada Biro Pemerintahan, dengan PPK pada sebagian kegiatan Satpol PP dan kegiatan pengurangan resiko bencana yang sesuai juknis ditetapkan pada satker Satpol PP dan BPBD sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.

### Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pembinaan/asistensi dan sosialisasi terhadap satker pengelola kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
2. Meningkatkan komunikasi, koordinasi serta menghindari munculnya ego kelembagaan mengingat pada hakekatnya kegiatan dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan bukan merupakan pelimpahan kewenangan kepada organisasi perangkat daerah.
3. Memastikan tingkat kedisiplinan dalam pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan (tertib administrasi), antara lain :
  - a. Konsisten dan komitmen terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  - b. Penyampaian data kontrak ke KPPN dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan;
  - c. Pengendalian dalam pengelolaan uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP);
  - d. Berkoordinasi dengan pembina teknis kegiatan dalam hal terjadi revisi anggaran atau pejabat perbendaharaan;
  - e. Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara, perlu didukung dengan rekonsiliasi internal antara SAK dengan SIMAK BMN;
  - f. Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang di dalamnya memuat informasi rinci berkenaan dengan semua transaksi keuangan.

**4**

**PAGU ANGGARAN PER  
KEGIATAN DANA  
DEKONSENTRASI TAHUN  
2018**



DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PAGU ANGGARAN PER KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN 2018



No	Jenis Dekonsentrasi	Rencana Alokasi	Ket
1	Peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi	9.000.000.000	34 Prov
2	Penguatan penyelenggaraan PTSP di daerah	6.000.000.000	16 Prov/ 51 Kab/kota
<b>TOTAL</b>		<b>15.000.000.000</b>	





## DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI



### Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di 34 Provinsi

No	Provinsi	Satker	Alokasi Anggaran
1	ACEH	Setda	270.186.000
2	SUMATERA UTARA	Setda	278.250.000
3	SUMATERA BARAT	Setda	243.795.000
4	R I A U	Setda	235.428.000
5	KEPULAUAN RIAU	Setda	260.334.000
6	J A M B I	Setda	248.181.000
7	SUMATERA SELATAN	Setda	260.334.000
			248.181.000
8	BANGKA BELITUNG	Setda	254.694.000
9	BENGKULU	Setda	270.951.000
10	LAMPUNG	Setda	228.855.000
11	BANTEN	Setda	223.940.000
12	DKI JAKARTA	Setda	179.134.000
13	JAWA BARAT	Setda	236.268.000
14	JAWA TENGAH	Setda	265.952.000
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Setda	203.590.000
16	JAWA TIMUR	Setda	381.268.000

No	Provinsi	Satker	Pagu Anggaran
17	BALI	Setda	308.292.000
18	KALIMANTAN BARAT	Setda	225.696.000
19	KALIMANTAN TENGAH	Setda	264.106.000
20	KALIMANTAN SELATAN	Setda	236.827.000
21	KALIMANTAN TIMUR	Setda	250.556.000
22	SULAWESI UTARA	Setda	254.383.000
23	GORONTALO	Setda	312.245.000
24	SULAWESI TENGAH	Setda	273.450.000
25	SULAWESI BARAT	Setda	279.654.000
26	SULAWESI TENGGARA	Setda	258.130.000
27	SULAWESI SELATAN	Setda	306.633.000
28	NUSA TENGGARA BARAT	Setda	243.904.000
29	NUSA TENGGARA TIMUR	Setda	263.900.000
30	MALUKU	Setda	289.455.000
31	MALUKU UTARA	Setda	264.647.000
32	PAPUA	Setda	348.723.000
33	PAPUA BARAT	Setda	355.530.000
34	KALIMANTAN UTARA	Setda	245.012.000





## ALOKASI DAN LOKASI KEGIATAN DEKONSENTRASI 2018



### Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah 16 Provinsi / 51 Kab/kota

No	Provinsi	Kabupaten/kota	Alokasi Anggaran
1.	Sumatera Barat	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota	409.413.000
2.	Riau	Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak	346.316.000
3.	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun	302.860.000
4.	Jambi	Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo	355.465.000
5.	Sumatera Selatan	Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin	394.713.000
6.	Bengkulu	Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara	355.145.000
7.	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Belitung Timur	329.287.000
8.	Banten	Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang	312.491.000
9.	D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman	308.665.000
10.	Bali	Kota Denpasar, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Tabanan	415.106.000
11.	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat	361.940.000
12.	Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kapuas Hulu	360.795.000
13.	Sulawesi Tengah	Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol	399.113.000
14.	Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Kabupaten Luwuk Utara, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone	501.801.000
15.	Gorontalo	Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara	432.540.000
16.	Maluku	Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah	414.350.000



**TERIMA KASIH**

